

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
(Studi pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Diajukan oleh:

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Bayu Qori Andhika H.

No. Mahasiswa : 04312093

Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2008

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
(Studi pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**



Oleh :

Nama : Bayu Qori Andhika H.

No. Mahasiswa : 04312093

Jurusan : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

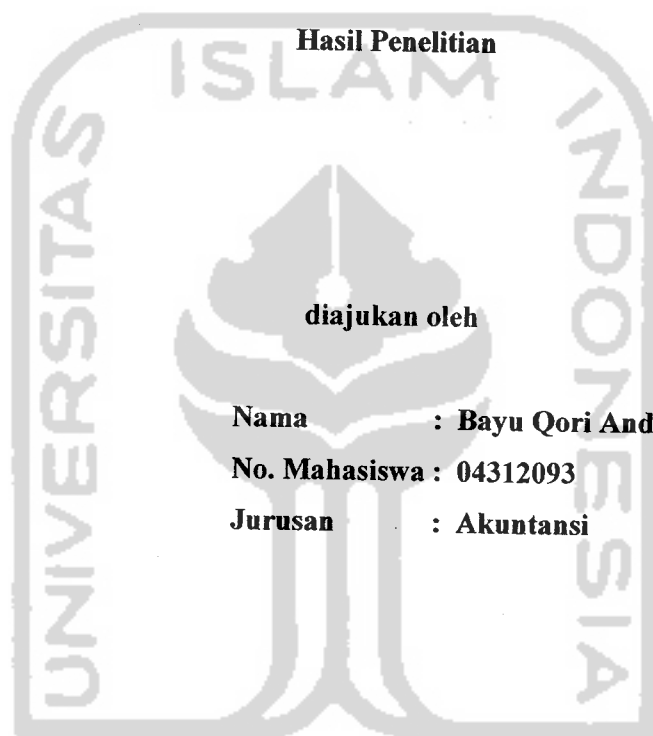
"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, Juni 2008

Penyusun,

(Bayu Qori Andhika H.)

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
(Studi pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Hasil Penelitian

diajukan oleh

Nama : Bayu Qori Andhika H.

No. Mahasiswa : 04312093

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing,

6/8
/6

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kesit Bambang Prakosa', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive.

(Kesit Bambang Prakosa, Drs, MAP)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

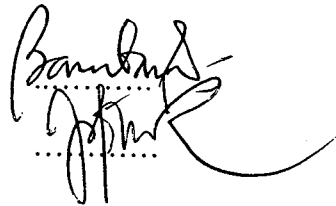
(Studi Pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh: **BAYU QORI ANDHIKA HERWANTO**
Nomor Mahasiswa: 04312093

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 23 Juli 2008

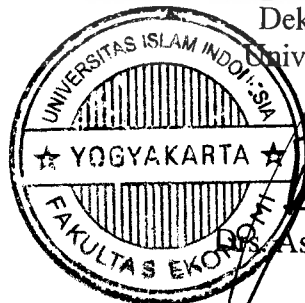
Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si



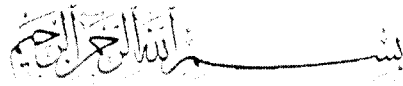
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam. Hanya karena ridho Allah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ” **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi universitas Islam Indonesia.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik tetapi penulis juga menyadari banyak keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyadari tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan. pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Yang selalu memberikan petunjuk dalam setiap jejak langkahku, dan membiarkan otak ini berfikir sehingga agar dapat menuju jalan yang Kau berikan.

2. Bapak Drs.H.Asmai Ishak.Mbus.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Kesit Bambang Prakosa, Drs, MAP selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas bimbingan dan waktu yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Syamsul Hadi,DRS.,MS.,Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membimbing dan memberikan pengajaran tentang segala hal di kampus perjuangan ini.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Orang Tua ku tersayang, Mama ku dan Papa ku. Terima kasih selama ini selalu memberikan dukungan, doa, serta semua hal yang bisa membuatku bisa seperti ini, walau bagaimanapun seorang anak ini tidak bisa membalas kasih sayang kalian. Kasih sayang yang tercurah takkan pernah terlihat cacat dimataku. Abah dan Emih juga embah Kono dan embah Putri yang juga selalu mendoakan cucu nya yang tercinta ini. Serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam setiap langkah yang akan aku pijak.
8. Adik semata wayangku, Herdiana Annisa Rahmawati. Ibadahnya jangan lupa, belajarnya yang tekun, jadilah kebanggaan orang tua. Pada saatnya nanti dirimu akan berpijak pada kedua kakimu sendiri, siapkan semua hal yang bisa membuatmu bertahan untuk itu.

9. *My inspiration*, Indria Novianti. Bintang di malamku, dan mentari di pagiku. Terima kasih telah setia menunggu dan menemaniku, menyadarkan aku akan arti cinta. (Karena hati *nggak* bisa bohong kan' sayang??) Tetaplah berjalan disampingku, pegang tanganku dan jangan pernah melepaskan.
10. Buat mas Arief tercinta terima kasih atas semua bantuannya, sukses selalu buat kamu.
11. Teman seperjuanganku dan teman-teman kost ku, Bangkid "item"(kejar apa yang ingin kamu capai), Wawan "ndut" (tetaplah tabah dalam menghadapi setiap masalah yang Allah berikan padamu), Taufik "mey-mey" (kamu adalah pria yang periang, terima kasih ahli komputerku), Ari beserta istri (kapan married?? Undangan aku tunggu), Dedi "bolang"(tiga hari, tiga malam untuk menuju kost ku), Andra (cowok paling ganteng lah), Pahlevi (yang awet ya ma Rona), Wira (bingung mau *comment* apa), Wongky (yang terbaik datangnya ga buru-buru), Ikbal (sukses ya, makasih kamu ngasih banyak masukan). Kalian menjadi bagian sejarah hidupku yang singkat ini. Sukses selalu ku doakan untuk kita semua, karena hidup ini adalah jalan untuk mencapai apa yang diharapkan.
12. Teman mainku semasa semester awal, Desty dan Adian. Ayo semangat!!!
13. Keluarga besar 33-ku tersayang. Mas Jamal, bimbing terus keluarga mu mas. Semoga jika anaknya cowok, gantengnya lebih dari Bayu, Hehehe... Mas Priyo, entah kapan kita bisa ketemu lagi. Mba Erna sukses buat setiap pekerjaan ya. Yulis "Bon-Bon" kapan yan aku bisa ketemu terus bayar utang pulsa ku, hehehe... Mas Dede, calon hakim agung dari Perambanan, besok

aku calonkan dirimu jadi play boy aja lah ☺. Imat si alis nyambung, aku punya cita-cita buat menceraikan alismu yang nyambung mirip dukun itu ☺, Anjar, orang pintar itu kalah dengan orang beruntung, semoga keduanya kamu miliki. Wisnu, kasian ga pernah di urus orang tuanya, kurang makan makanya pe'ang terus. Yang langgeng ya dengan Diah "slank" nya. Nana, kapan-kapan aku kasih liat kamu "jamur masa depan", semoga kita wisuda bareng. Reni, aku ga pernah liat kamu lagi kemana aja? Siapkan segala hal di tempatmu, jika pada saatnya nanti aku berhadapan dengannya. Rahma, aku nge-fans banget sama penyiar satu ini. Selamat mengeluti dunia entertain nya aja. Terimakasih, karena telah membuat kisah selama aku KKN dan sampai saat ini. Aku selalu berharap, persahabatan ini akan tidak akan lekang dimakan waktu.

14. Pusphasari "iput cuprut" Nur Rizky, bukan hanya teman tapi saudara. Banyak memberikan masukan dalam kisahku dengan wanitaku. Kamu yang selalu tahu bagaimana aku jatuh, terbang, tenggelam, terhempas, dan ketika aku berjaya. Terlalu banyak kisah yang kita lewati, dan tak secuilpun hal kecil yang aku sembunyikan darimu. Terimakasih karena telah membukakan mataku, bahwa segala hal harus dilihat dari berbagai sudut. Aku tunggu undangan pernikahanmu dengan pangeran yang bernama Purnama Yudha.
(Perjanjian telah ditepati)
15. Teman baruku, mbak As3 "cemplon", Pu3 "ubur-ubur", Nita "nit-not", dan Piti "mamiiek". Maksaih kalian menjelma menjadi warna baru ketika aku memasuki tahun terakhir di kota ini.

KATAKANLAH "DIA ADALAH ALLAH, TUHAN YANG MAHA ESA. ALLAH SATU-SATUNYA TEMPAT BERGANTUNG, IA TIDAK BERANAK DAN TIADA PULA DIPERANAKAN, TIADA SESUATU PUN YANG SEPADAN DENGAN NYA"

(AL IKHLAS :1-4)

"DEMI WAKTU, SESUNGGUHNYA MANUSIA ITU DALAM KERUGIAN, KECUALI MEREKA YANG BERIMAN, BERAMAL SALEH, DAN YANG SALING BERPELANCANG DALAM KEBENARAN DAN KESABARAN"

(AL-'ASHR:1-3)

LIHATLAH SEKSAMA DIRI KITA. MAKA KITA AKAN MELIHAT AL-AHAD DISITU. KALAU KITA BELUM BISA MELIHATNYA. PERCAYALAH DIA SELALU MELIHAT KITA. PIKIRAN KITA MEUPUN NIAT KITA. KARENA DIA DISAMPING SEBAGAI AL-AHAD (YANG MAHA ESA), DIA JUGA SEBAGAI AL-BASHIR (YANG MAHA MELIHAT), DAN AL-SAMI (YANG MAHA MENDENGAR)

APABILA HATI SEORANG HAMBA KHUSYU' MENYEMBAH KEPADA ALLAH. MAKA SELURUH TUBUHNYA, BAHKAN SETIAP SEL ALIRAN DARAH YANG MEMBANGUN TUBUH DAN JIWANYA AKAN MENYEMBAH PULA DENGAN KHUSYUK' DAN TAWADHU

Dinamis adalah tanda-tanda kehidupan

Statis adalah tanda-tanda kematian

Kebingunganmu adalah awal dari pengetahuanmu

(Khalil Gibran)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	10
1.6.1. Sumber Data dan Pengumpulan Data.....	10
1.6.2 Metode Analisis Data.....	10
1.6.2.1 Pengujian Parsial.....	11
1.6.2.2 Pengujian Stimultan.....	11
1.6.2.3 Pengujian Ketepatan Model (<i>Goodnes of Fit Test</i>).....	11

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	10
1.6.1. Sumber Data dan Pengumpulan Data.....	10
1.6.2 Metode Analisis Data.....	10
1.6.2.1 Pengujian Parsial.....	11
1.6.2.2 Pengujian Stimultan.....	11
1.6.2.3 Pengujian Ketepatan Model (<i>Goodnes of Fit Test</i>).....	11

1.7 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Anggaran Daerah Sektor Publik.....	14
2.2 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia.....	15
2.3 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik.....	15
2.3.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif.....	16
2.3.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik...	17
2.4 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia.....	18
2.5 Hipotesis Penelitian.....	18
2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.5.2 Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.5.3 Dana Alokasi Umum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Populasi dan Sampel.....	33
3.2 Sumber Data.....	33
3.3 Variabel Penelitian.....	33
3.3.1 Dependen Variabel.....	34
3.3.2 Independen Variabel.....	34
3.4 Model Penelitian	35
3.5 Pengujian Analisis Data.....	36
3.5.1 Pengujian Parsial.....	38

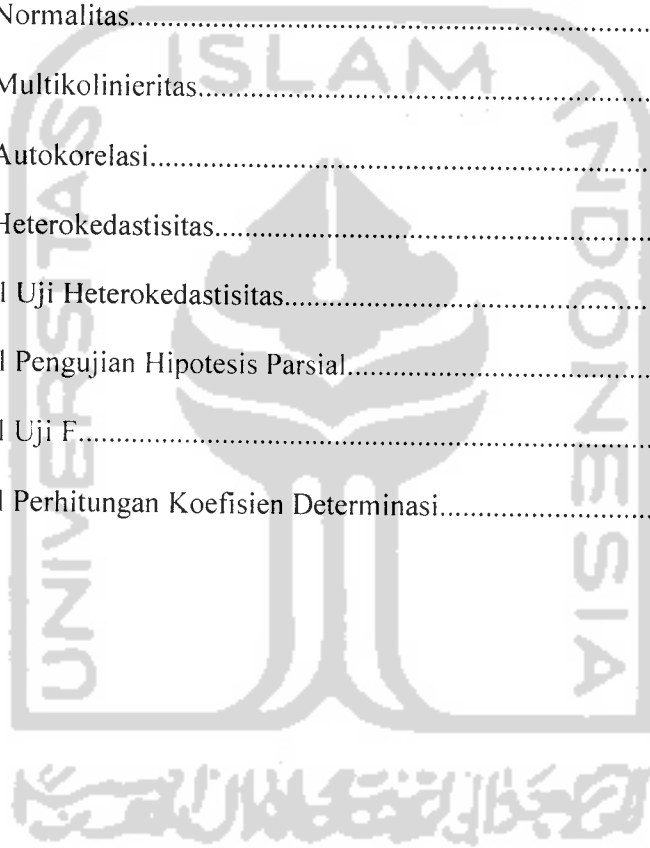
3.5.2 Pengujian secara Simultan.....	39
3.5.3 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (<i>Goodnes of Fit Test</i>).....	40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Statistik Deskriptif.....	41
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.2.1 Uji Normalitas.....	42
4.2.2 Uji Multikolinieritas.....	43
4.2.3 Uji Autokorelasi.....	45
4.2.4 Uji Heterokedastisitas.....	45
4.3 Pengujian Hipotesis (Uji t).....	46
4.3.1 Hasil Perhitungan Hipotesis 1.....	47
4.3.2 Hasil Perhitungan Hipotesis 2.....	48
4.3.3 Hasil Prhitungan Hipotesis 3.....	49
4.3.4 Hasil Pengujian Simultan.....	49
4.3.5 Pengujian Ketepatan perkiraan Model (<i>Goodnes of Fit Test</i>).....	50
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
BAB V KESIMPULAN.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	58
5.3 Saran Bagi Penelitian Mendatang.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Gambar Hubungan Pusat dan Daerah.....	29
4.1 Statistik Deskriptif.....	41
4.2.1 Uji Normalitas.....	43
4.2.2 Uji Multikolinieritas.....	44
4.2.3 Uji Autokorelasi.....	45
4.2.4 Uji Heterokedastisitas.....	45
4.2.4 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	46
4.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis Parsial.....	47
4.3.4 Hasil Uji F.....	49
4.3.5 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Data PDRB 2002-2006.....	61
2. Data DAU 2002-2006.....	62
3. Data PAD 2002-2006.....	63
4. Data Anggaran Belanja Modal 2002-2006.....	64
5. Data Mentah 2002-2006.....	65
6. Hasil Pengujian Data.....	66



ABSTRAK

Belanja Modal Adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi nilai pertumbuhan ekonomi yang di proksi dengan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi 0.05. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05. Pengujian Ketepatan Perkiraan Model bertujuan untuk menguji tingkat keceratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*) dengan nilai *adjusted R-square* berkisar antara -1 hingga 1.

Hasil analisa yang diperoleh membuktikan bahwa ketiga variabel yang mempengaruhi (PDRB, PAD dan DAU) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengalokasian anggaran belanja modal. Hipotesis ke 1 variabel PDRB terbukti mempengaruhi belanja modal dengan sig-hitung sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ke 2 PAD terbukti mempengaruhi belanja modal dengan sig-hitung 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ke 3 terbukti mempengaruhi belanja modal dengan sig-hitung 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa PDRB, PAD, dan DAU secara simultan mempengaruhi belanja modal. Pengujian ketepatan perkiraan model mempunyai nilai R-square 80,2%, yang berarti bahwa variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh PDRB, PAD, dan DAU sebesar 80,2%.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa variabel PDRB, PAD, dan DAU mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu pula, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi yang dimiliki dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Hal ini juga memisahkan dengan tegas antara fungsi

Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif).

Pelaksanaan otonomi daerah memasuki tahapan baru setelah dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah menilai perlu adanya perubahan Undang-undang mengenai Pemerintah Daerah karena UU No. 22 tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 juga disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

Terlepas dari adanya kontroversi yang ada, dalam UU No. 32 tahun 2004 terlihat adanya semangat untuk melibatkan partisipasi publik. Di satu sisi, keterlibatan publik (masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami peningkatan luar biasa dengan diaturnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Dari anatomi tersebut, jelaslah bahwa revisi yang dilakukan terhadap UU No. 22 tahun 1999 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang

selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sekilas UU No. 32 tahun 2004 masih menyisakan banyak kelemahan, tapi harus diakui pula banyak peluang dari UU tersebut untuk menciptakan *good governance*, paling tidak di tataran konseptual.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (Pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung sebagai investasi awal. Konsekuensinya, Pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2005) dalam David Harianto dan Prio Hari Adi (2007), menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) dalam David Harianto dan Prio Hari Adi (2007), mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam realisasi pelayanan publik baik untuk propinsi, maupun kabupaten dan kota. Untuk mewujudkan otonomi daerah

dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Anggaran sektor publik Pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumber daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Fozzard, 2001 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007). Keterbatasan sumber daya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja

menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan Pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja Pemerintah, sehubungan dengan fungsi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja Pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana Pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian dibidang anggaran pada Pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Hasil penelitian yang dilakukan (Lin & Liu 2000 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya desentrali fiskal dalam hal ini adalah penyusunan APBD dapat menunjukkan potensi fiskal antara Pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain, yang bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada akhirnya dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang beragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah, sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan Pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja Pemerintah, sehubungan dengan fungsi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja Pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana Pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian dibidang anggaran pada Pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Hasil penelitian yang dilakukan (Lin & Liu 2000 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya desentrali fiskal dalam hal ini adalah penyusunan APBD dapat menunjukkan potensi fiskal antara Pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain, yang bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada akhirnya dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang beragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah, sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengaruh transfer dari Pemerintah pusat terhadap belanja Pemerintah daerah memiliki keterkaitan antara keduanya. Studi (Legrenzi & Milas, 2001 dalam Harianto, David & Prio Hari Adi, 2007) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer pemerintah berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *taxspend hypothesis* (Aziz et al, 2000 dalam Prakosa, 2004). Dalam hal ini anggaran pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap,

seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, (Stine 1994 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007) menyatakan bahwa penerimaan Pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan hubungan antra pertumbuhan ekonomi, DAU, dan PAD terhadap penyusunan anggaran belanja yang dibuat dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran), oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) ”

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Pemerintah daerah yang akan diteliti adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang hubungan antara pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi adalah memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.
2. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal.
3. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi para peneliti di bidang otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala dan tambahan informasi bagi para akademisi guna menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang ilmu keuangan daerah khususnya pada tingkat pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan Anggaran Belanja Modal.
- 3) Diharapkan akan membuka wawasan baru bagi aparat daerah sekaligus sebagai aspek dalam memberikan informasi bagi masyarakat, berkenaan dengan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai masukan berharga untuk perumusan ulang kebijakan yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan lain yang lebih adil sehingga tercipta keselarasan.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dari penelitian ini meliputi :

1.6.1 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, baik kabupaten dan kota tahun 2002 – 2006 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

1.6.2 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*). Hasil model analisis data ini telah lolos telah melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas data, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat dalam appendik tulisan ini.

Pengujian hipotesis menggunakan data panel bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi pengujian secara parsial dan simultan.

1.6.2.1 Pengujian Parsial

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Dengan membandingkan nilai signifikansi nilai t-hitung dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05.

1.6.2.2 Pengujian secara Simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

1.6.2.3 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (Goodnes of Fit Test)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keerratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*).

1.7 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penelitian ini dituangkan dalam 5 bab,yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berisi, tinjauan teoritis akan tujuan utama proses perumusan anggaran, tahapan-tahapan penyusunan anggaran, proses penyusunan anggaran di Indonesia, hubungan keagenan akan proses penganggaran, hubungan keagenan dengan Eksekutif dan Legislatif, hubungan keagenan antara Legislatif dan publik, hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah di Indonesia, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan keterangan terperinci mengenai data yang dibutuhkan, metode pengumpulan, dan metode analisis yang dipakai penulis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian dan berdasarkan data-data yang dikumpulkan, pengujian analisis dan pembahasan tentang hasil analisis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Daerah Sektor Publik

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik yang didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR yang pada akhirnya akan ada dana yang dialokasikan untuk kemudahan di transfer kepada pemerintah daerah.

Tujuan utama dari proses perumusan anggaran adalah menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan *input* dan *output* dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yang pertama adalah perumusan proposal anggaran, yang kedua adalah pengesahan proposal anggaran, dan yang terakhir adalah pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007). Sedangkan menurut (Von Hagen, 2002 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative*

approval, executive implementation, dan ex post accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agen.

2.2 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan pola pikir dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) adalah konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumber daya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

2.3 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan

menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Lupia & McCubbins (2000) dalam Purwanto dan Yulia Yustikasari (2007), menyatakan: “*delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal's behalf.*”

2.3.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Fozzard, 2001 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, adalah pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, sebagai pihak yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

2.3.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (*Voters*)

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal. Dalam hal pembuatan kebijakan, (Von Hagen.2003 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, tetapi pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

Lupia & McCubbins (2000) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (*abdication*), yakni adanya kondisi dimana agen tidak dibatasi dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (*voters*) terkesan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka pilih.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan abdikasi menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku *hazard* legislatif dapat terjadi dengan mudah.

2.4 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta

sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal kepada setiap daerah masing-masing. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal dapat menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada mengakibatkan dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah dalam hal ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Saragih, 2003). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar

akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Wong, 2004 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007).

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi “Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan yang lebih mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani (2003) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007), secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interest*nya. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.5.2 Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah dalam menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan arus dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah hendaknya tidak disalahartikan untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sumber pendapatan baru dalam mengejar pendapatan asli daerah untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada era otonomi, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Cara itu dimungkinkan melalui penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah seharusnya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, dengan jalan meningkatkan *tax ratio*-nya, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan penerimaan domestik regional bruto (PDRB). Dengan demikian pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah tersebut, jangan sampai malah mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat di

daerahnya. Jadi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah tergantung pada kejelian Kepala Daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki serta kualitas anggota legislatif yang mengontrol jalannya pembangunan.

Menurut pasal 7 UU No. 33 tahun 2004, dalam upayanya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dilarang menerapkan hal-hal:

- 1) menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- 2) menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam penetapan Perda mengenai pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, yang dimaksud adalah pengaturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan propinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh dari pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan ekspor/impor antara lain adalah retribusi izin masuk kota, pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Kemudian penelitian yang dilakukan Yuyun Ardiyana (2004) pada Dispenda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) intensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada, seperti pajak dan retribusi daerah.
- 2) ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadi, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*.

Studi Abdullah (2004) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru

mengalami penurunan. Abdullah juga menduga kekuatan legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (Hoover & Sheffrin, 1992 dalam Prakosa, 2004) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. Friedman (1978) dalam Prakosa, (2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga pada akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992) dalam Prakosa, (2004) yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*casually independent*).

Sumber-sumber penerimaan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi menurut pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan;

- c. lain-lain pendapatan.

Sedangkan sumber dari pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. penerimaan pinjaman daerah;
- c. dana cadangan daerah;
- d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penelitian ini dibatasi salah satunya adalah membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja modal. Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama dalam pelaksanaan desentralisasi, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan ataupun penerimaan lainnya merupakan pendukung dari pendapatan asli daerah.

Menurut Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan asli daerah berasal dari:

- 1) pajak daerah.
- 2) retribusi daerah.
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) lain-lain PAD yang sah.

Adapun yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah:

- 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- 2) jasa giro.
- 3) pendapatan bunga.
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- 5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Pasal 1 point 6 dan 26 UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

" Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. "

Sesuai Pasal 158 UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Perda dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Baik pajak daerah maupun retribusi yang dilaksanakan oleh daerah adalah pungutan yang

sesuai UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam hal meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan melalui pajak, akan tercermin dari tingkat PAD yang di peroleh oleh suatu daerah, dengan demikian diharapkan dalam hal ini pemerintah dapat menambah jumlah investasi modalnya (belanja modal). Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada didaerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha didaerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode dimasa yang akan datang, yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat dan bertambahnya investor, dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Wong (2004) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

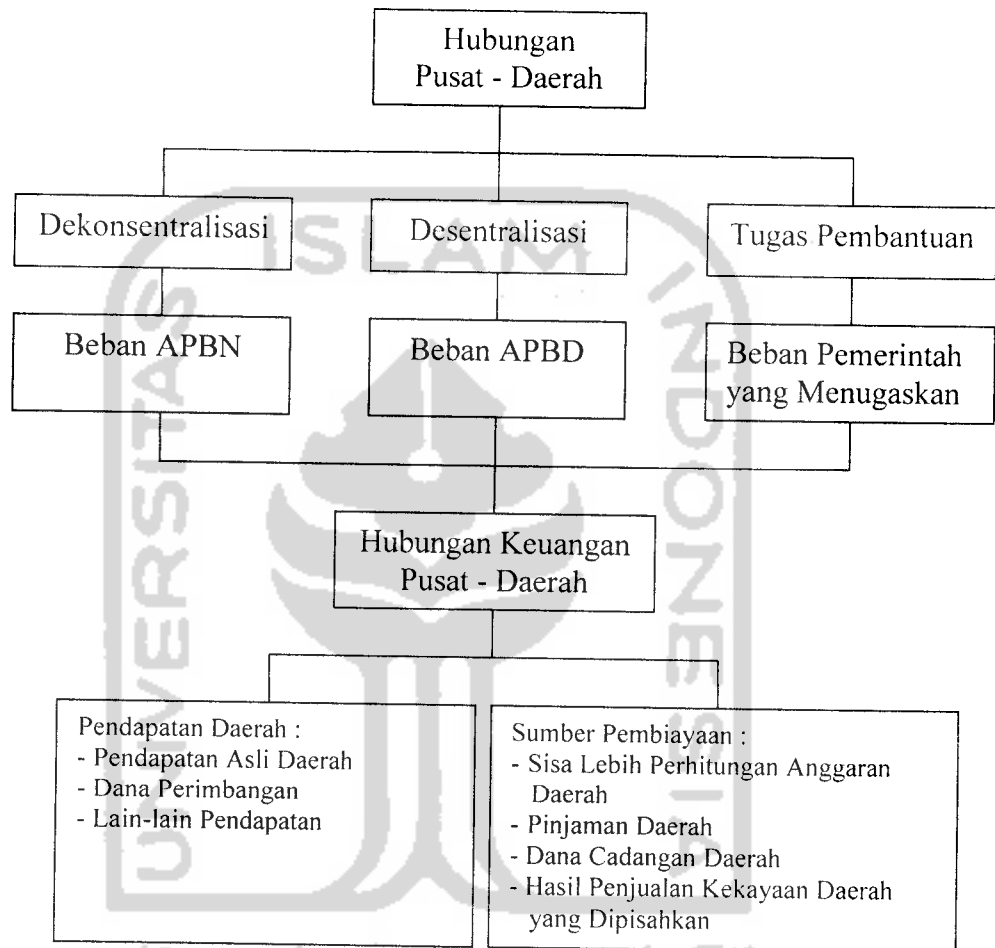
H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.5.3 Dana Alokasi Umum

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ketiga prinsip tersebut juga melandasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta di evaluasi dengan menerapkan analisis varian terhadap anggaran dan realisasi anggaran yang sesungguhnya. Secara umum, hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH



Sumber: UU No. 32 tahun 2004 dalam Mardiasmo, 2004

Adanya kebijakan desentralisasi merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendelegasikan wewenangnya kepada daerah guna mengoptimalkan potensi daerah. namun dalam implementasinya banyak faktor yang ikut mempengaruhinya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi yang merupakan penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Dengan adanya transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga dana transfer tersebut dapat digunakan dengan leluasa oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dalam pengalokasiannya, DAU dibagi berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan

pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et al (1985) dalam Prakosa (2004), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Prakosa (2004), menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan belanja modal dapat berpengaruh terhadap pengurangan belanja modal. Prakosa (2004) memperoleh temuan empiris sama, yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Kecenderungan ini mengakibatkan daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta baik kabupaten dan Kota. Alasan pemilihan sampel ini adalah daerah kabupaten dan kota ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang hampir sama.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/kota se Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2006. Dari laporan realisasi ini diperoleh data mengenai jumlah laporan realisasi Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Kesemua data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut:

3.3.1 *Dependent Variabel :*

Belanja Modal

Belanja Modal Adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

3.3.2 *Independent Variabel :*

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

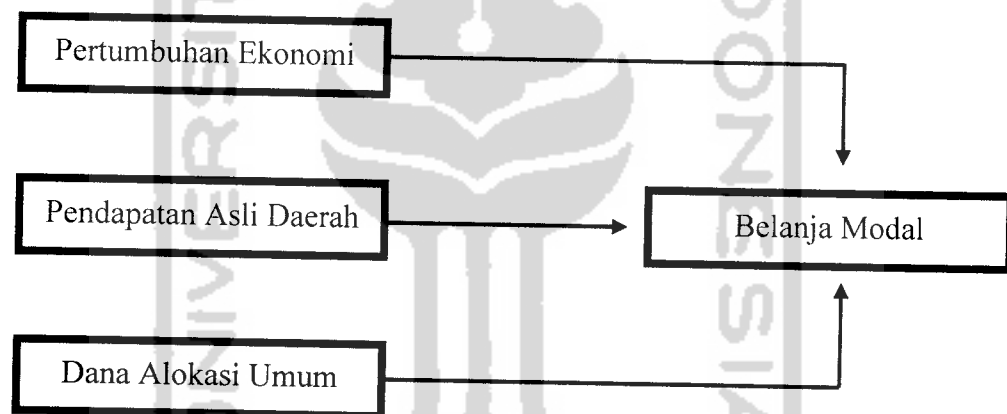
PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah yang bersumber dari pungutan daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya adalah Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Besarnya pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995).

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Transfer ini bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

3.4 Model Penelitian



Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992 dalam Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007). Persamaan regresi adalah :

$$Y = \alpha + \beta \text{PDRB} + \beta \text{PAD} + \beta \text{DAU} + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = *error*

3.5. Pengujian Analisis Data

Alat analisis pada penelitian ini adalah dengan model analisis regresi berganda. Sedangkan untuk pengujian analisis data penelitian ini menggunakan beberapa pengujian yang terdiri dari pengujian parsial, pengujian secara simultan dan pengujian ketepatan perkiraan model (*goodness of fit test*). Untuk memperoleh hasil analisis data yang memenuhi syarat pengujian maka penelitian ini melakukan pengujian asumsi klasik untuk pengujian statistik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Pada normalisasi data dengan Normal P-Plot, suatu variabel dikatakan normal jika

gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas dan yang terjadi cukup besar. Hal ini akan menyebabkan perkiraan keberatan koefisien regresi yang diperoleh.

Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dalam sebuah regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Persyaratan untuk terbebas dari multikolinier adalah apabila nilai VIF prediktor tidak melebihi nilai 10 (Wahana Komputer, 2005).

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (*time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (*cross-sectional data*). Dalam suatu analisa regresi dimungkinkan terjadinya hubungan antar variabel-variabel bebasitu sendiri atau berkorelasi sendiri (Wahana Komputer 2002).

Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin Watson diantaranya :

1. Jika nilai DW hitung terletak di daerah I disimpulkan terjadi autokorelasi negatif.
 2. Jika DW hitung masuk ke daerah II maupun IV maka tidak dapat disimpulkan karena masuk daerah ragu-ragu.
 3. Jika DW hitung masuk daerah III maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Daerah ini merupakan daerah penerimaan H_0 .
 4. Jika DW hitung terletak di daerah V maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi positif.
- d. Heterokedastisitas
- Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah *Structural Equation Modeling* yang digunakan mengandung variansi residual yang bersifat heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas menggunakan *scatter plot* nilai residual variabel dependen. Pengambilan kesimpulan diketahui dengan memperhatikan sebaran plot data. Jika sebaran data tidak mengumpul di satu sudut/bagian maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.1. Pengujian Parsial

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual (masing-masing prediktor) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengaruh secara individual ditunjukkan dari nilai Sig. uji-t. jika nilai

Sig.uji $t < 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing prediktornya.

Langkah-langkahnya sebagai berikut :

Hipotesis :

H_a : terdapat pengaruh positif secara individu variabel independen terhadap variabel dependen

H_o : tidak terdapat pengaruh positif secara individu variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_o : gagal ditolak

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_o : ditolak

3.5.2. Pengujian secara Simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hasil korelasi ganda serta koefisien analisis regresi. Jika nilai uji F adalah signifikan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi/pengaruh yang signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai Sig uji-F dengan nilai signifikansi yang digunakan sebesar 0,05.

Hipotesis :

H_a : terdapat pengaruh positif secara serentak variabel independen terhadap variabel dependen

H_o : tidak terdapat pengaruh positif secara serentak variabel independen terhadap variabel dependen

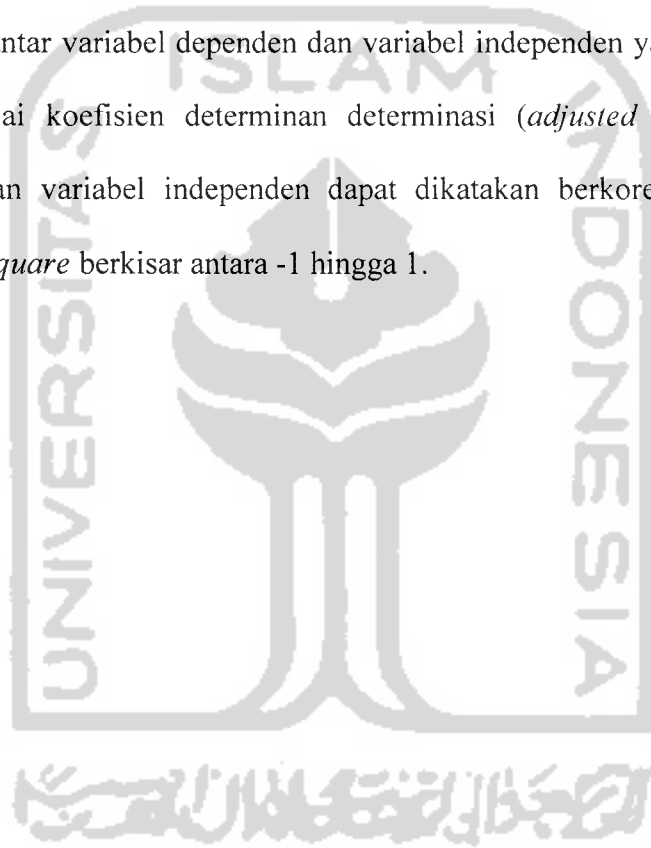
Ketentuan :

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 : gagal ditolak

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 : ditolak

3.5.3. Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (*Goodness of Fit Test*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Variabel dependen dan variabel independen dapat dikatakan berkorelasi erat jika nilai *adjusted R-square* berkisar antara -1 hingga 1.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pengujian regresi berganda seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk mengetahui karakter sampel yang digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Statistic Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	30	369912	17521378	6776055,2333	3998693,34685
PAD	30	13486860	433757022	83184127,2667	107208166,96425
DAU	30	162874512	485397000	277595140,8667	81714984,76978
Belanja Modal	30	13164101	123797319	49286034,7667	31191911,70187
Valid N (listwise)	30				

Dari tabel 4.1 dapat kita lihat bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 sampel. Variabel dependen PDRB memiliki rata-rata sebesar 6.776.055,2333 dan standar deviasi sebesar 3.998.693,34685. Variabel independen PAD memiliki rata-rata sebesar 83.184.127,2667 dan standar deviasi sebesar 107.208.166,96425. Variabel independen DAU memiliki rata-rata sebesar 277.595.140,8667 dan standar deviasi sebesar 81.714.984,76978. Variabel independen Belanja Modal memiliki rata-rata sebesar 49.286.034,7667 dan standar deviasi sebesar 31.191.911,70187.

4.2 Uji asumsi Klasik

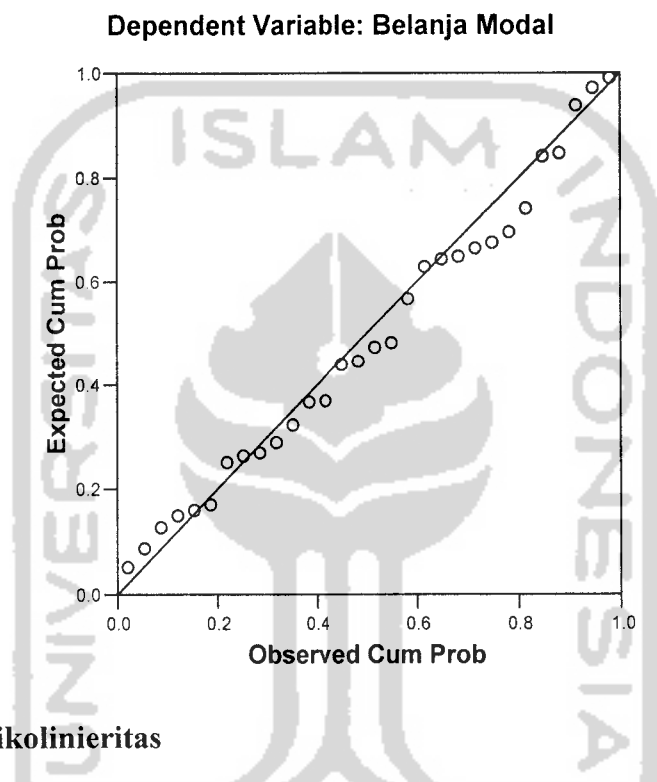
Penggunaan alat statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Pengujian atas asumsi klasik terdiri atas (1) uji normalitas data, (2) multikolinieritas, (3) autokorelasi, (4) heterokedastisitas.

4.2.1 Uji Normalitas

Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Hasil dari uji normalitas menunjukkan penyebaran titik-titik data searah garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal, jadi data dapat dikatakan normal.

Tabel 4.2.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



4.2.2 Uji Multikolinieritas

Dilihat dari hasil pengujian terhadap kedua hipotesis penelitian, maka dilakukan pengujian terhadap data untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik terhadap analisis atas faktor-faktor dan akibatnya yang harus dipertimbangkan dalam analisis.

Multikolinieritas bukanlah persoalan mengenai apakah korelasi diantara variabel-variabel bebas itu negatif atau positif tetapi merupakan persoalan mengenai adanya korelasi diantara variabel-variabel bebas yang harus dicermati. Uji

multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang berarti antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Metode yang digunakan untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance value atau *variance inflation factor* (VIF) yang dapat dihitung melalui program SPSS. Batas dari tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.2.2 menunjukkan hasil dari pengujian gejala multikolinieritas. Hasil pengujian itu memperlihatkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan *tolerance value* masing-masing variabel independen yang berada diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini terbukti dengan tidak adanya gejala multikolinieritas

TABEL 4.2.2
HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
PDRB	0,946	1,057	Tidak terjadi multikolinieritas
PAD	0,942	1,061	Tidak terjadi multikolinieritas
DAU	0,995	1,005	Tidak terjadi multikolinieritas

4.2.3 Uji Autokorelasi

Dari hasil ketiga variabel independen tidak mengandung multikolinieritas yang kemudian diregresikan dihasilkan nilai Durbin Watson adalah 2,188 sedangkan dari table Durbin Watson diketahui $n = 30$ dan 3 ekplantory variabel maka, $dl = 1,214$ $du = 1,650$ dengan tingkat signifikan 0,05. Perhitungan Durbin Watson dengan nilai 2,188 terletak diatas nilai du dan dibawah $4 - du$ (berada diwilayah tiga) ini berarti model tersebut tidak mengandung autokorelasi dan dalam model regresi karena $dw = 2,188 > du = 1,650$.

Tabel 4.2.3

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.907 ^a	.822	.802	13892007,5	2.188

a. Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

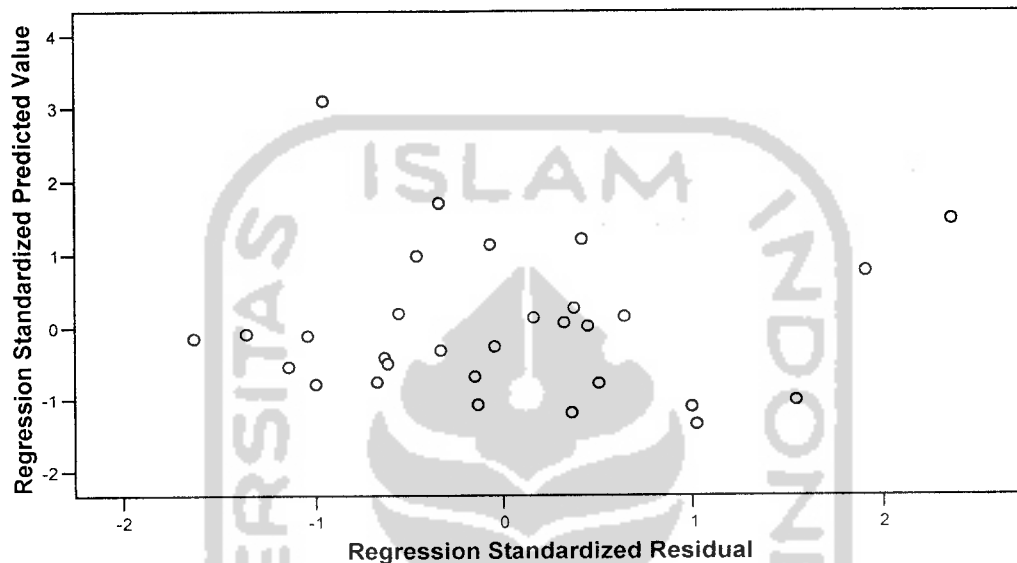
b. Dependent Variabel: Belanja Modal

4.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas menggunakan scatterplot nilai residual variabel dependen. Pengambilan kesimpulan diketahui dengan memperhatikan sebaran plot data. Jika sebaran data tidak mengumpul di satu sudut/bagian maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Modal



Dengan memperhatikan sebaran plot data, yang tidak mengumpul di satu sudut/bagian maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

4.3 Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik, kemudian dilakukan pengujian hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 yang diturunkan dengan persamaan regresi menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dari ketiga variabel idependen terhadap Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.1

Hasil Pengujian Hipotesis Parsial

Model	Unstanddarized Coefficiens		Standardized Coefficiens	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error				
1(Constant)	-37173944.78	10037104.098		-3.704	0.001	Ho Ditolak (signifikan)
PDRB	2.297	0.663	0.294	3.464	0.002	Ho Ditolak (signifikan)
PAD	0.163	0.025	0.561	6.587	0.000	Ho Ditolak (signifikan)
DAU	0.206	0.032	0.541	6.523	0.000	Ho Ditolak (signifikan)

Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan dibawah ini :

$$\text{Belanja Modal} = -37173944,78 + 2,297 \text{ PDRB} + 0,163 \text{ PAD} + 0.206 \text{ DAU}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan :

4.3.1 Hasil Perhitungan Hipotesis 1

Hipotesis 1 memprediksi terdapat pengaruh positif yang signifikan dari PDRB terhadap Belanja Modal. Pengujian terhadap hipotesis 1 dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dari variabel PDRB terhadap Belanja Modal.

Tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi (sig-hitung) sebesar 0,002. Tingkat signifikansi tersebut adalah lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga variabel PDRD berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Variabel PDRB mempunyai koefisien regresi dengan arah yang searah sebesar 2,297 hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel PDRB dengan variabel Belanja modal adalah positif. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa jika

PDRB naik 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan naiknya variabel belanja modal sebesar 2,297 satuan.

4.3.2 Hasil Perhitungan Hipotesis 2

Hipotesis 2 memprediksi terdapat pengaruh positif yang signifikan dari PAD terhadap Belanja Modal. Pengujian terhadap hipotesis 2 dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dari variabel PAD terhadap Belanja Modal.

Tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi (sig-hitung) sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut adalah lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga variabel PAD berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Variabel PAD mempunyai koefisien regresi dengan arah yang searah sebesar 0,163 hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel PAD dengan variabel Belanja modal adalah positif. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa jika PAD naik 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan naiknya variabel belanja modal sebesar 0,163 satuan.

4.3.3 Hasil Perhitungan Hipotesis 3

Hipotesis 3 memprediksi terdapat pengaruh positif yang signifikan dari DAU terhadap Belanja Modal. Pengujian terhadap hipotesis 3 dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dari variabel DAU terhadap Belanja Modal.

Tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi (sig-hitung) sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut adalah lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$,

sehingga variabel DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Variabel DAU mempunyai koefisien regresi dengan arah yang searah sebesar 0,206 hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel DAU dengan variabel Belanja modal adalah positif. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa jika DAU naik 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan naiknya variabel belanja modal sebesar 0,206 satuan.

Hal menarik dari hasil regresi yang dilakukan dengan uji t, ketiga variabel independen yang di ujikan, ternyata PAD dan DAU terlihat paling dominan mempengaruhi Belanja Modal dibandingkan dengan PDRB. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* yang keduanya mempunyai tingkat signifikansi masing-masing adalah 0,000 (PAD) dan 0,000 (DAU).

4.3.4 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 4.3.4

Hasil Uji F

Variabel Independen	F	Sig.	Keterangan
PDRB,PAD,DAU	40,067	0,000	Ho ditolak (signifikan)

Pengujian secara simultan pada tabel 4.3.4 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai Sig. F hitung sebesar 40,067 dengan signifikansi

0,000 yang berada dibawah nilai signifikansi yang digunakan 0,05 ($\alpha = 0,05$), yang berarti bahwa variabel independen DAU, PAD, dan PDRB secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Belanja Modal. Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD.

4.3.5 Pengujian Ketepatan perkiraan Model (*Goodness of Fit Test*)

Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas, digunakan *adjusted R-square* sebagai koefisien determinasi. Dari pengujian ini dapat diketahui tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*) nya

Tabel 4.3.5

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,907	0,822	0,802

Pada Tabel 4.3.5 di atas, besarnya *adjusted R square* adalah 0,802. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga variabel bebas dengan variabel terikat adalah positif. Semakin tinggi *R-square* yang disesuaikan (*adjusted R-square*) akan semakin baik suatu model regresi, karena variabel bebas bisa menjelaskan variabel terikat lebih besar. Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa 80,2% Belanja Modal dapat dijelaskan oleh PDRB, PAD, dan DAU. Sedangkan sisanya, sebesar 19,8%,

dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan pada awal bab, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara PDRB, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Dari hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa PDRB memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dengan begitu adanya otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar pula bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini yang mendorong daerah untuk mengalokasikan dana secara lebih efisien untuk berbagai sumber potensi lokal yang dimilikinya dalam upaya memenuhi kepentingan publik.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sektor publik lainnya, diharapkan dapat dinikmati masyarakat sebagai akibat dari pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, harus ditunjang dengan fasilitas infrastruktur yang baik. Dengan adanya infrastruktur yang didukung oleh daerah akan menunjang masyarakat untuk lebih aktif dan begairah dalam bekerja, dan dengan adanya produktifitas yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya didaerah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi mempunyai korelasi positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi kurang begitu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Pengalokasian Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan karena dalam penelitian ini dilakukan sampel data dari satu wilayah Pemerintah Propinsi Daerah dan data yang digunakan adalah sebanyak lima tahun Anggaran.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2000) dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), yang menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi yang di berikan kepada setiap daerah memberikan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada hasil pengujian hipotesis kedua, telah dibuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat di daerahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin

besar nilai Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula stimulus dalam meningkatkan Belanja Daerah, yang salah satunya adalah Belanja Modal. Belanja modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi. Dengan di tambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah diharapkan akan memicu pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang dananya akan kembali disalurkan untuk kegiatan investasi. Jadi semakin besar dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula dana yang disalurkan untuk belanja modal.

Kemampuan daerah dalam menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung kepada terealisasinya potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan arus dana untuk meningkatkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana dalam pemerintahan legislatif sebagai pembuat kebijakan memberikan prinsipal yang mendelegasikan kewenangannya kepada eksekutif dalam memberikan usulan akan kebijakan yang akan dibuat yang pada akhirnya usulan tersebut dapat diterima atau ditolak. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yang dapat di mungkinakan melalui pajak daerah atau retribusi daerah. Dalam hal ini menyangkut dengan bagaimana pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa mengorbankan kepentingan publik. Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

tidak boleh disalahartikan untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sumber pendapatan dengan mengorbankan kepentingan publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Daerah.

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Tujuan dari adanya transfer ini adalah sebagai pemerataan kemampuan fiskal suatu daerah dan mengurangi kesenjangan keuangan karena kebutuhan daerah yang melebihi kemampuan potensi suatu daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah nya. Dengan adanya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat kepada daerah, yang diharapkan dana transfer tersebut dapat digunakan dengan leluasa oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Holtz-Eakin (1994) dalam David Harianto & Prio Hari Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja

modal sangat dipengaruhi oleh DAU, ini membuktikan bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki hubungan yang nyata dengan Belanja Modal. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menemukan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi dengan jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat hal ini disebabkan dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan pada tiap daerah sebagai konsekuensi adanya desentralisasi dan tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Kesit Bambang Prakosa (2004), juga menyatakan bahwa secara empiris besarnya Belanja Daerah yang dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Dari pengujian secara simultan diperoleh hasil perhitungan yang menyatakan bahwa variabel independen Pertumbuhan Ekonomi yang di proksi dengan PDRB, DAU, dan PAD secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dependen Belanja Modal. Dengan demikian penyusunan Anggaran Belanja Modal dalam APBD dapat dipengaruhi secara signifikan terhadap faktor pertumbuhan Ekonomi, meningkat atau menurunnya PAD dan besar atau kecilnya transfer pemerintah melalui DAU.

Dari pengujian Ketepatan perkiraan Model (*Goodness of Fit Test*) menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga variabel bebas, PDRB, PAD dan DAU dengan variabel terikat Belanja Modal adalah positif. Dari penelitian tersebut variabel dependen dapat dijelaskan dengan variabel independen yang dimasukkan kedalam penelitian ini.

Hal menarik dari hasil regresi dalam penelitian ini yaitu dengan terjadinya *flypaper effect*, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap belanja modal dibandingkan dengan PDRB.

Ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah PAD dan DAU yang diterima. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat PAD yang tinggi, tetapi pada satu sisi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah juga masih tinggi.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah pariwisata, dimana semua potensi daerah yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan PAD yang dapat mempengaruhi Anggaran Belanja dengan sangat signifikan. Hal tersebut diimbangi dengan banyaknya belanja pegawai yang dilakukan oleh pemda sehingga mempengaruhi jumlah dana yang di transfer dari pemerintah pusat kepada daerah.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel yang mempengaruhi, ketiganya terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap banyaknya pengalokasian Belanja Modal.

Hipotesis pertama terbukti bahwa tingkat PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Hipotesis kedua terbukti bahwa PAD mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Hipotesis ketiga terbukti bahwa DAU mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Pengujian secara simultan antara ketiga variabel independen yaitu PDRB, DAU, dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan atas variabel dependen Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan f sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 0,05$.

Model yang digunakan mempunyai nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,802 berarti 80,2% dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 19,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diuji dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, yaitu :

Karena data untuk variabel dependen merupakan variabel baru sehingga dimungkinkan kurang untuk melakukan generalisasi atas penelitian ini. Penelitian ini juga belum mencakup aspek-aspek lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya aspek kebijakan publik, aspek manajemen keuangan, aspek penganggaran daerah, dan aspek psikologis pembuat keputusan di pemda. Pada pengujian di daerah lain dimungkinkan hasil yang berbeda atas pengujian yang dilakukan.

5.3 Saran Bagi Penelitian Mendatang

1. Penggunaan data yang lebih lengkap, tidak hanya pada satu daerah dengan ditambahkan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambahkan variabel independen lain baik ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variable non keuangan, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makro ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, Yuyun, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus pada Dispenda DIY)*, Skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII : 2003
- Badan Pusat Statistik. *Yogyakarta dalam Angka*. 2002. BPS Yogyakarta.
- _____, *Yogyakarta dalam Angka*. 2003. BPS Yogyakarta.
- _____, *Yogyakarta dalam Angka*. 2004. BPS Yogyakarta.
- _____, *Yogyakarta dalam Angka*. 2005. BPS Yogyakarta.
- _____, *Yogyakarta dalam Angka*. 2006. BPS Yogyakarta.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. 2007, Simposium Nasional Akuntansi X.
- Diah, Meinanti Utami, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang Proporsional (Studi pada Badan Pengeluaran Keuangan Daerah Kota Yogyakarta)*, Skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII : 2007.
- Halim & Syukry Abdullah, *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa dan Bali)*, 2004, Jurnal Ekonomi STEI No. 2/ tahun XIII/25.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*. 2002, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, *Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Studi Kasus pada Anggaran Daerah Propinsi di Indonesia)*. 2001 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4) : 346-357

- Harianto, David & Prio Hari Adi, *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*, 2007, Simposium Nasional Akuntansi X
- Kustiawan, Memen, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus pada Dispenda Jawa Barat)*, Komisi C Simposium Nasional Akuntansi IV : 2001.
- Lembar Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Fokus Media, Bandung : 2006.
- Lembar Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Fokus Media, Bandung : 2006.
- Liesa, Hendy Prabowo, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Studi Kasus pada Pemda Kabupaten Wonogiri)*, Skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII : 2007.
- Mamaesah DJ, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, 1995, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Mardiasmo, *Manajemen Pemerintah Daerah dan Struktur APBD dalam era Otonomi Daerah*, dalam Kajian Ekonomi Bisnis Indonesia STIEKERS, Yogyakarta :2002
- Prakosa, Kesit Bambang, *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*, 2004, JAAI Vol.8 No.2. 101-118.
- Saragih, Panglima Juli, *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003.
- Undang-Undang no.34 tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang NO.18 tahun 1997, tentang pajak dan Retribusi Daerah.
- Wahana Komputer, Pengembangan analisis multivariate SPSS 12. 2005, Salemba empat : Semarang



LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO	Kabupaten/ Kota	Dana Alokasi Umum (Juta Rupiah)				
		2002	2003	2004	2005	2006
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA						
1	Propinsi DI Yogyakarta	214,480,000.00	214,480,000.00	248,049,000.00	238,692,000.00	402,848,000.00
2	Kabupaten Kulon Progo	209,056,943.00	215,470,000.00	215,470,000.00	231,438,000.00	344,038,000.00
3	Kabupaten Bantul	258,680,000.00	292,700,000.00	292,700,000.00	308,106,000.00	470,847,000.00
4	Kabupaten Gunung Kidul	216,810,771.00	251,340,000.00	255,640,000.00	268,320,000.00	432,868,000.00
5	Kabupaten Sleman	255,350,000.00	304,780,000.00	307,330,000.00	318,140,000.00	485,397,000.00
6	Kota Yogyakarta	162,874,512.00	196,100,000.00	197,787,000.00	201,230,000.00	316,832,000.00

NO	Kabupaten/ Kota	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Juta Rupiah)				
		2002	2003	2004	2005	2006
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA						
1	Propinsi DI Yogyakarta	5,215,431.00	5,906,623.00	6,801,464.00	7,602,192.00	8,680,516.00
2	Kabupaten Kulon Progo	2,988,247.00	3,302,936.00	369,912.00	5,549,837.00	6,455,176.00
3	Kabupaten Bantul	3,470,524.00	3,812,889.00	5,101,507.00	5,676,117.00	6,507,392.00
4	Kabupaten Gunung Kidul	3,877,682.00	4,200,578.00	677,891.00	5,654,168.00	6,425,139.00
5	Kabupaten Sleman	5,188,757.00	5,790,951.00	6,892,528.00	7,745,976.00	8,829,211.00
6	Kota Yogyakarta	10,594,545.00	11,852,833.00	15,034,273.00	15,554,984.00	17,521,378.00

DATA MENTAH TAHUN 2002 -
2006

No	PDRB	PAD	DAU	Belanja Modal
1	5215431	169489772	214480000	27872156
2	2988247	16225501	209056943	20617794
3	3470524	22425147	258680000	18523054
4	3877682	13486860	216810771	16817118
5	5188757	38908193	255350000	17948110
6	10594545	56377460	162874512	27899025
7	5906623	208475720	214480000	46998625
8	3302936	18250898	215470000	31770392
9	3812889	32882359	292700000	28599218
10	4200578	17481692	251340000	34319642
11	5790951	42522488	304780000	31536161
12	11852833	68621564	196100000	41117456
13	6801464	290099681	248049000	70655185
14	369912	17514817	215470000	25263449
15	5101507	32181481	292700000	35603593
16	677891	20728379	255640000	42011038
17	6892528	54913300	307330000	55657909
18	15034273	70412081	197787000	56004155
19	7602192	375879788	238692000	123797319
20	5549837	22512410	231438000	13164101
21	5676117	33701537	308106000	22322591
22	5654168	23424202	268320000	26490558
23	7745976	64030957	318140000	62065788
24	15554984	79414345	201230000	55414598
25	8680516	433757022	402848000	123498176
26	6455176	28891548	344038000	62393768
27	6507392	39330140	470847000	80477877
28	6425139	25485903	432868000	97670744
29	8829211	86472070	485397000	92722513
30	17521378	91626503	316832000	89348930

Hasil Pengujian Data

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	30	369912.00	17521378.00	6776055.2333	3998693.34685
PAD	30	13486860.00	433757022.00	83184127.2667	107208166.96425
DAU	30	162874512.00	485397000.00	277595140.8667	81714984.76978
Belanja Modal	30	13164101.00	123797319.00	49286034.7667	31191911.70187
Valid N (listwise)	30				

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Asumsi Klasik

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PDRB, PAD(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Belanja Modal

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.907(a)	.822	.802	13892007.52154	2.188

a Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

b Dependent Variable: Belanja Modal

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23197440615456700. 000	3	7732480205152230.000	40.067	.000(a)
	Residual	5017684697437110.0 00	26	192987872978350.700		
	Total	28215125312893820. 000	29			

a Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

b Dependent Variable: Belanja Modal

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-37173944.77 7	10037104.0 98		-3.704	.001		
	PDRB	2.297	.663	.294	3.464	.002	.946	1.057
	PAD	.163	.025	.561	6.587	.000	.942	1.061
	DAU	.206	.032	.541	6.523	.000	.995	1.005

a Dependent Variable: Belanja Modal

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PDRB	PAD	DAU
1	1	3.279	1.000	.01	.02	.03	.01
	2	.498	2.565	.01	.01	.95	.01
	3	.186	4.199	.03	.90	.02	.09
	4	.037	9.390	.96	.07	.00	.89

a Dependent Variable: Belanja Modal

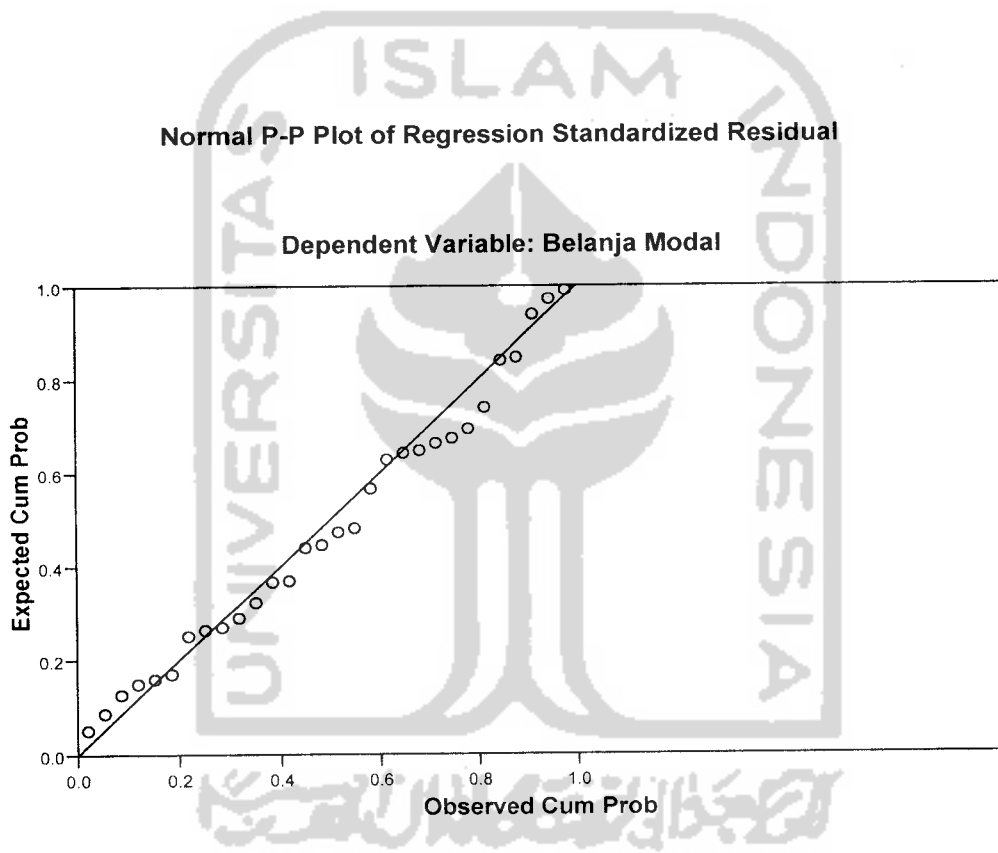
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	11022487.0000	136766464.0000	49286034.7667	28282711.06808	30
Residual	-22656342.00000	32850776.00000	.00000	13153843.93463	30
Std. Predicted Value	-1.353	3.093	.000	1.000	30
Std. Residual	-1.631	2.365	.000	.947	30

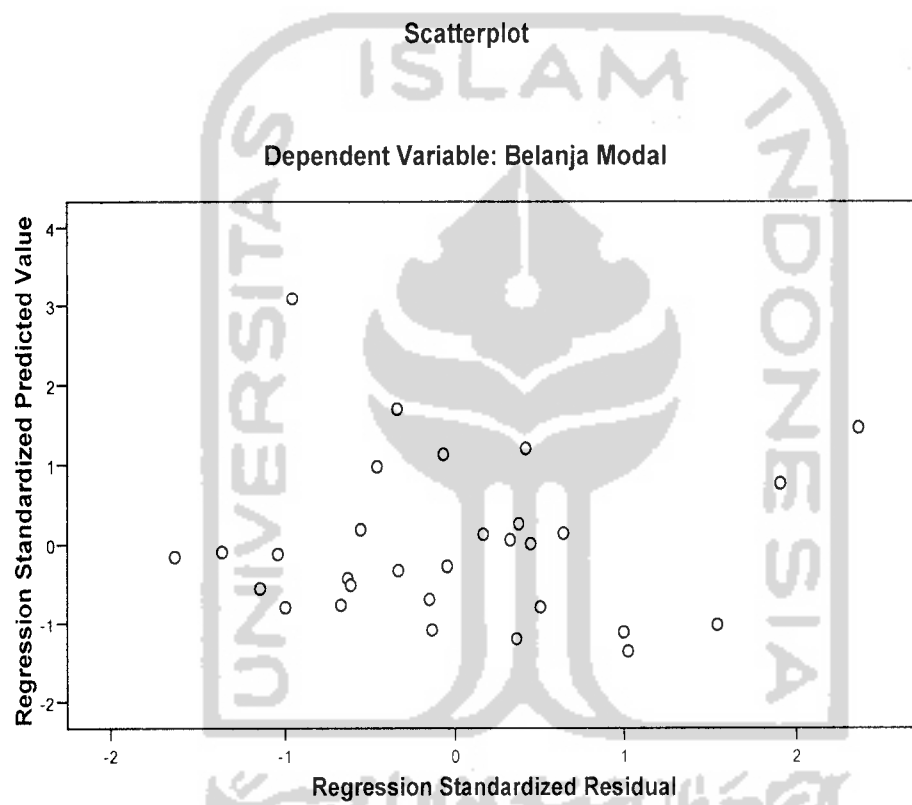
a. Dependent Variable: Belanja Modal



Uji Normalitas



Uji Heterokedasitas



Tabel Durbin-Watson Statistic : 5 percent significant points of dL and dU

N	K=1		K=2		K=3		K=4		K=5		K=6		K=7		K=8		K=9		K=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.610	1.400																		
7	0.700	1.356	0.467	1.896																
8	0.763	1.332	0.559	1.777	0.368	2.287														
9	0.824	1.320	0.629	1.699	0.455	2.128	0.296	2.588												
10	0.879	1.320	0.697	1.641	0.525	2.016	0.376	2.414	0.243	2.822										
11	0.927	1.324	0.758	1.604	0.595	1.928	0.444	2.283	0.316	2.645	0.203	3.005								
12	0.971	1.331	0.812	1.579	0.658	1.864	0.512	2.177	0.379	2.506	0.268	2.832	0.171	3.149						
13	1.010	1.340	0.861	1.562	0.715	1.816	0.574	2.094	0.445	2.390	0.328	2.692	0.230	2.985	0.147	3.266				
14	1.045	1.350	0.905	1.551	0.767	1.779	0.632	2.030	0.505	2.296	0.389	2.572	0.286	2.848	0.200	3.111	0.127	3.360		
15	1.077	1.361	0.946	1.543	0.814	1.750	0.685	1.977	0.562	2.220	0.447	2.472	0.343	2.727	0.251	2.979	0.175	3.216	0.111	3.438
16	1.106	1.371	0.982	1.539	0.857	1.728	0.734	1.935	0.615	2.157	0.502	2.388	0.398	2.624	0.304	2.860	0.222	3.090	0.155	3.304
17	1.133	1.381	1.015	1.536	0.897	1.710	0.779	1.900	0.664	2.104	0.554	2.318	0.451	2.537	0.356	2.757	0.272	2.975	0.198	3.184
18	1.158	1.391	1.046	1.535	0.933	1.696	0.820	1.872	0.710	2.060	0.603	2.257	0.502	2.461	0.407	2.667	0.321	2.873	0.244	3.073
19	1.180	1.401	1.074	1.536	0.967	1.685	0.859	1.848	0.752	2.023	0.649	2.206	0.459	2.396	0.456	2.589	0.369	2.783	0.290	2.974
20	1.120	1.411	1.100	1.537	0.998	1.676	0.894	1.828	0.792	1.991	0.692	2.162	0.595	2.339	0.502	2.521	0.416	2.704	0.336	2.885
21	1.221	1.420	1.125	1.538	1.026	1.669	0.927	1.812	0.829	1.964	0.732	2.124	0.637	2.290	0.547	2.460	0.461	2.633	0.380	2.806
22	1.239	1.429	1.147	1.541	1.053	1.664	0.958	1.797	0.863	1.940	0.769	2.090	0.677	2.246	0.588	2.407	0.504	2.571	0.424	2.734
23	1.257	1.437	1.168	1.543	1.078	1.660	0.986	1.785	0.895	1.920	0.804	2.061	0.715	2.208	0.628	2.360	0.545	2.514	0.465	2.670
24	1.273	1.446	1.188	1.546	1.101	1.656	1.013	1.775	0.925	1.902	0.837	2.033	0.751	2.174	0.666	2.318	0.584	2.464	0.506	2.613
25	1.288	1.454	1.206	1.550	1.123	1.654	1.038	1.767	0.953	1.886	0.868	2.012	0.784	2.144	0.702	2.280	0.621	2.419	0.544	2.560
26	1.302	1.461	1.224	1.553	1.143	1.652	1.062	1.759	0.979	1.873	0.897	1.992	0.816	2.117	0.735	2.246	0.657	2.379	0.581	2.513
27	1.316	1.469	1.240	1.556	1.162	1.651	1.084	1.753	1.004	1.861	0.925	1.974	0.845	2.093	0.767	2.216	0.691	2.342	0.616	2.470
28	1.328	1.476	1.255	1.560	1.181	1.650	1.104	1.747	1.028	1.850	0.951	1.958	0.874	2.071	0.798	2.188	0.723	2.309	0.650	2.431
29	1.341	1.483	1.270	1.563	1.198	1.650	1.124	1.743	1.050	1.841	0.975	1.944	0.900	2.052	0.826	2.164	0.753	2.278	0.682	2.396
30	1.352	1.489	1.284	1.567	1.214	1.650	1.143	1.739	1.071	1.833	0.998	1.931	0.926	2.034	0.854	2.141	0.782	2.251	0.712	2.363
31	1.363	1.496	1.297	1.570	1.229	1.650	1.160	1.735	1.090	1.825	1.020	1.920	0.950	2.018	0.879	2.120	0.810	2.226	0.741	2.333
32	1.373	1.502	1.309	1.574	1.244	1.650	1.177	1.732	1.109	1.819	1.041	1.909	0.972	2.004	0.904	2.102	0.836	2.203	0.769	2.306
33	1.383	1.508	1.321	1.577	1.258	1.651	1.193	1.730	1.127	1.813	1.061	1.900	0.994	1.991	0.927	2.085	0.861	2.181	0.795	2.281
34	1.393	1.514	1.333	1.580	1.271	1.652	1.208	1.728	1.144	1.808	1.080	1.891	1.015	1.979	0.950	2.069	0.885	2.162	0.821	2.257
35	1.402	1.519	1.343	1.584	1.283	1.653	1.222	1.726	1.160	1.803	1.097	1.884	1.034	1.967	0.971	2.054	0.908	2.144	0.845	2.236
36	1.411	1.525	1.354	1.587	1.295	1.654	1.236	1.724	1.175	1.799	1.114	1.877	1.053	1.957	0.991	2.041	0.930	2.127	0.868	2.216
37	1.419	1.530	1.364	1.590	1.307	1.655	1.249	1.723	1.190	1.795	1.131	1.870	1.071	1.948	1.011	2.029	0.951	2.112	0.791	2.197
38	1.427	1.535	1.373	1.594	1.318	1.656	1.261	1.722	1.204	1.792	1.146	1.864	1.088	1.939	1.029	2.017	0.970	2.098	0.912	2.180
39	1.435	1.540	1.382	1.597	1.328	1.658	1.273	1.722	1.218	1.789	1.161	1.859	1.104	1.932	1.047	2.007	0.990	2.085	0.932	2.164
40	1.442	1.544	1.391	1.600	1.338	1.659	1.285	1.721	1.230	1.786	1.175	1.854	1.120	1.924	1.064	1.997	1.008	2.072	0.945	2.149
45	1.475	1.566	1.430	1.615	1.383	1.666	1.336	1.720	1.287	1.776	1.238	1.835	1.189	1.895	1.139	1.958	1.089	2.002	1.038	2.088
50	1.503	1.585	1.462	1.628	1.421	1.674	1.378	1.721	1.335	1.771	1.291	1.822	1.246	1.875	1.201	1.930	1.156	1.986	1.110	2.044
55	1.528	1.601	1.490	1.641	1.452	1.681	1.414	1.724	1.374	1.768	1.334	1.814	1.294	1.861	1.253	1.909	1.212	1.959	1.170	2.010
60	1.549	1.616	1.514	1.652	1.480	1.689	1.444	1.727	1.408	1.767	1.372	1.808	1.335	1.850	1.298	1.894	1.260	1.939	1.222	1.984
65	1.567	1.629	1.536	1.662	1.503	1.696	1.471	1.731	1.438	1.767	1.404	1.805	1.370	1.843	1.336	1.882	1.301	1.923	1.266	1.964
70	1.583	1.641	1.554	1.672	1.525	1.703	1.494	1.735	1.464	1.768	1.433	1.802	1.401	1.837	1.369	1.873	1.337	1.910	1.305	1.948
75	1.598	1.652	1.571	1.680	1.543	1.709	1.515	1.739	1.487	1.770	1.458	1.801	1.428	1.834	1.399	1.867	1.369	1.901	1.339	1.935
80	1.611	1.662	1.586	1.688	1.560	1.715	1.534	1.743	1.507	1.772	1.480	1.801	1.453	1.831	1.425	1.861	1.397	1.893	1.369	1.925
85	1.624	1.671	1.600	1.696	1.575	1.721	1.550	1.747	1.525	1.774	1.500	1.801	1.474	1.829	1.448	1.857	1.422	1.886	1.396	1.916
90	1.635	1.679	1.612	1.703	1.589	1.726	1.566	1.751	1.542	1.776	1.518	1.801	1.494	1.827	1.469	1.854	1.445	1.881	1.420	1.909
95	1.645	1.687	1.623	1.709	1.602	1.732	1.579	1.755	1.557	1.778	1.535	1.802	1.512	1.827	1.489	1.852	1.465	1.877	1.442	1.903
100	1.654	1.694	1.634	1.715	1.613	1.736	1.592	1.758	1.571	1.780	1.550	1.803	1.528	1.826	1.506	1.850	1.484	1.874	1.462	1.898
150	1.720	1.746	1.706	1.760	1.693	1.774	1.679	1.788	1.665	1.802	1.651	1.817	1.637	1.832	1.622	1.847	1.608	1.868	1.574	1.877
200	1.758	1.778	1.748	1.789	1.738	1.799	1.728	1.810	1.718	1.820	1.707	1.831	1.697	1.841	1.686	1.832	1.675	1.863	1.665	1.874

Sumber : Sritua Arief, 1993 : 295